



PROSIDING

SEMINAR NASIONAL

“Optimalisasi Peran Pendidikan
dalam Membangun Karakter Anak
untuk Menyongsong Generasi Emas Indonesia”

Keynote speaker:

1. Satria Dharma
2. Dr. Ipah Saripah, M.Pd.
3. Prof. Dr. H. Sutrisno, M.Ag.

Jogja Expo Center (JEC), 14 Desember 2014



PRODI PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR
PRODI BIMBINGAN KONSELING
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN

PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN DAN PEMBENTUKAN KARAKTER DEMOKRATIS WARGA NEGARA

Dikdik Baehaqi Arif, M.Pd

Program Studi PPKn FKIP Universitas Ahmad Dahlan

Email: cikaracak@gmail.com

Abstrak

Warga negara ideal yang memiliki karakter demokratis dan bertanggung jawab diperlukan sebagai modal sosial (social capital) pembangunan karakter bangsa. Selain penting sebagai modal sosial, karakter demokratis warga negara sekaligus memerlukan modal intelektual (intellectual capital) yang penting untuk membentuk warga negara yang bertanggung jawab, yaitu yang memiliki pengetahuan terhadap prinsip-prinsip dan praktik demokrasi serta kapasitas kognitif untuk menerapkan pengetahuan itu terhadap urusan publik. Perlunya modal intelektual ini juga karena memiliki korelasi positif dengan atribut-atribut lain dari warga negara yang baik, seperti toleransi politik, dan kepekaan terhadap harapan politik publik. Dalam konteks demikian, Pendidikan Kewarganegaraan di sekolah (school civic education), dipandang dapat menjadi wahana pembentuk karakter demokratis warga negara melalui pengembangan komponen karakter demokratis, yaitu pengetahuan kewargaan dan pemerintahan demokrasi; kecakapan kognitif dari kewargaan demokratis; kecakapan partisipasi dari kewargaan demokratis; dan keutamaan karakter kewargaan demokratis.

Keywords: *karakter demokratis, karakter bangsa, pendidikan kewarganegaraan persekolahan, pengetahuan kewargaan, kecakapan kewargaan.*

1. Pendahuluan

Perlunya pembangunan bangsa dan karakter yang oleh presiden RI pertama, Ir. Soekarno ditemakan dengan *national and character building* telah secara konstitusional dinyatakan dalam Pembukaan UUD 1945. Namun demikian, dalam perjalanannya, kita masih mendapati beberapa permasalahan kebangsaan, baik permasalahan politik, ekonomi, maupun

sosial budaya yang memerlukan prioritas dan perhatian untuk dipecahkan.

Dalam refleksi tentang visi dan karakter bangsa, Pimpinan Pusat Muhammadiyah telah mengidentifikasi empat permasalahan utama kebangsaan, sebagai berikut: *Pertama*, memudarnya rasa dan ikatan kebangsaan yang ditandai oleh menguatnya primordialisme (etnis/kedaerahan, kelompok, dan keagamaan). *Kedua*, kehidupan beragama masih

dihadapkan pada paradoks antara maraknya semangat keagamaan dengan kecenderungan sikap hidup permisif, materialistik, dan sekuler yang berlawanan dengan nilai-nilai luhur agama. Keberagaman belum sepenuhnya berfungsi sebagai faktor integratif dalam mewujudkan kerukunan, kebersamaan, dan budaya anti kekerasan dalam konfigurasi kemajemukan bangsa.

Ketiga, memudarnya kohesi dan integrasi sosial yang ditandai oleh munculnya berbagai bentuk tindak kekerasan dengan motif yang sangat kompleks dalam kehidupan masyarakat, berbagai bentuk perilaku menyimpang dan kriminalitas yang cenderung meningkat, pranata sosial yang luhur seperti gotong royong dan saling menghormati perbedaan semakin meluruh dalam tata kehidupan sosial, dan masih kuatnya budaya patriarki yang membawa implikasi pada pandangan yang merendahkan harkat dan martabat perempuan.

Keempat, dalam kehidupan masyarakat terdapat kecenderungan pelemahan mentalitas yang mencerminkan mental bangsa yang lembek (*soft nation*) yang ditandai oleh kecenderungan sikap inlander, inferior, suka menerabas, perilaku instant, tidak disiplin, suka meremehkan masalah, tidak menghargai mutu, kurang bertanggung jawab, mudah mengingkari janji, dan toleran terhadap penyimpangan. Pada saat yang sama kurang berkembang

perilaku yang positif seperti kerja keras, jujur, terpercaya, cerdas, tanggung jawab, menghargai kualitas, dan mentalitas yang unggul lainnya (PP Muhammadiyah, 2009:10-22).

Berdasarkan berbagai permasalahan utama kebangsaan di atas, kekhawatiran kita tentang kondisi karakter ideal warga negara –sebagai prasyarat pembangunan karakter bangsa– serta prospek pembangunan bangsa dan negara di masa depan sangatlah beralasan. Itulah pula mengapa pemerintah mengambil inisiatif untuk mengarusutamakan pembangunan karakter bangsa dalam pembangunan nasional. Bahkan rumusan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 menempatkan pembangunan karakter sebagai misi utama dari delapan misi guna mewujudkan visi pembangunan nasional. Hal tersebut sebagaimana dapat kita baca dalam UU No. 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional yang menyatakan sebagai berikut “...terwujudnya karakter bangsa yang tangguh, kompetitif, berakhlak mulia, dan bermoral berdasarkan Pancasila, yang dicirikan dengan watak dan perilaku manusia dan masyarakat Indonesia yang beragam, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berbudi luhur, bertoleran, bergotong royong, berjiwa patriotik, berkembang dinamis, dan berorientasi IPTEKS”.

Fokus utama pembangunan bangsa sesungguhnya adalah untuk menumbuhkan dan memperkuat jati diri bangsa, menjaga keutuhan NKRI, dan membentuk manusia dan masyarakat Indonesia yang berakhlak mulia dan bangsa yang bermartabat (Pusat Kurikulum Kementerian Pendidikan Nasional, 2010). Oleh sebab itu, dapat dikatakan bahwa proses pembangunan karakter bangsa memiliki cakupan dan tingkat urgensi yang sangat luas dan bersifat multidimensional. Luas karena terkait dengan pengembangan seluruh aspek potensi keunggulan bangsa dan multidimensional karena mencakup dimensi-dimensi kebangsaan yang hingga saat ini sedang dalam proses “menjadi” (Winataputra, 2012:34).

Mencermati hal itu, pendidikan dapat kita ajukan sebagai salah satu wahana untuk pembangunan karakter bangsa. Sebab pendidikan merupakan hal terpenting untuk membentuk kepribadian. Dalam konteks formal, mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan di sekolah (*school civic education*) sesungguhnya memiliki peran utama dalam pembangunan karakter bangsa melalui pembentukan karakter demokratis warga negara. Makalah ini berusaha membahas proses pembentukan karakter demokratis warga negara di sekolah melalui mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan.

2. Urgensi Pembentukan Karakter Warga Negara

Ellen G. White (Hidayatullah, 2011) menyatakan bahwa pembangunan karakter adalah usaha paling penting yang pernah diberikan kepada manusia. Pembangunan karakter adalah tujuan luar biasa dari sistem pendidikan yang benar. Karenanya, menghubungkan pendidikan dengan pembangunan karakter bangsa tidak dapat dilepaskan dari rumusan fungsi dan tujuan pendidikan nasional. Dalam Pasal 3 UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dinyatakan fungsi pendidikan nasional adalah untuk mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Pada rumusan akhir tujuan pendidikan nasional itu, terdapat konsep “...menjadi warga negara yang demokratis...” yang patut dipahami sebagai karakter warga negara ideal yang dicita-citakan.

Lalu apa sebenarnya karakter itu? Dilihat dari asal katanya, karakter berasal dari kata Yunani *charaktêr* yang mengacu kepada suatu tanda yang terpatris pada sisi sebuah koin. Karakter menurut Kalidjernih

(2010) lazim dipahami sebagai kualitas-kualitas moral yang awet yang terdapat atau tidak terdapat pada setiap individu yang terekspresikan melalui pola-pola perilaku atau tindakan yang dapat dievaluasi dalam berbagai situasi.

Dalam Kamus Poerwadarminta, karakter diartikan sebagai tabiat, watak, sifat-sifat kejiwaan, akhlak atau budi pekerti yang membedakan seseorang daripada yang lain. Dalam pandangan Purwasasmita (2010) disebut watak jika telah berlangsung dan melekat pada diri seseorang. Karakter adalah cara berpikir dan berperilaku yang menjadi ciri khas tiap individu untuk hidup dan bekerjasama, baik dalam lingkup keluarga, masyarakat, bangsa dan negara. Menurut Suyanto (2009) individu yang berkarakter baik adalah individu yang bisa membuat keputusan dan siap mempertanggungjawabkan tiap akibat dari keputusan yang ia buat.

Secara psikologis dan sosiokultural pembentukan karakter dalam diri individu merupakan fungsi dari seluruh potensi individu manusia (kognitif, afektif, konatif, dan psikomotorik) dalam konteks interaksi sosiokultural (dalam keluarga, satuan pendidikan, dan masyarakat) dan berlangsung sepanjang hayat. Konfigurasi karakter dalam konteks totalitas proses psikologis dan sosiokultural tersebut dapat dibagi ke dalam empat kelompok, yaitu: olah hati (*spiritual and emotional development*),

olah pikir (*intellectual development*), olah raga dan kinestetik (*physical and kinesthetic development*), dan olah rasa dan karsa (*affective and creativity development*) (Kementerian Pendidikan Nasional, 2010).

Budimansyah (2010) mengurai konfigurasi karakter tersebut yaitu olah hati berkenaan dengan perasaan sikap dan keyakinan/keimanan menghasilkan karakter jujur dan bertanggung jawab. Olah pikir berkenaan dengan proses nalar guna mencari dan menggunakan pengetahuan secara kritis, kreatif, dan inovatif menghasilkan pribadi cerdas. Olah raga berkenaan dengan proses persepsi, kesiapan, peniruan, manipulasi, dan penciptaan aktivitas baru disertai sportivitas menghasilkan sikap bersih, sehat, dan menarik. Olah rasa dan karsa berkenaan dengan kemauan dan kreativitas yang tercermin dalam kepedulian, citra, dan penciptaan kebaruan menghasilkan kepedulian dan kreatifitas.

Berdasarkan pengertian di atas, dalam konteks suatu bangsa, karakter bangsa dapat dimaknai sebagai nilai-nilai keutamaan yang melekat pada setiap individu warga negara dan kemudian mengejawantah sebagai personalitas dan identitas kolektif bangsa (PP Muhammadiyah, 2009). Karakter bangsa dalam hal ini berfungsi sebagai kekuatan mental dan etik yang mendorong suatu bangsa merealisasikan cita-cita kebangsaannya dan menampilkan keunggulan-keunggulan komparatif,

kompetitif, dan dinamis di antara bangsa-bangsa lain. Karena itu, menurut rumusan tersebut, manusia Indonesia yang berkarakter kuat adalah manusia yang memiliki sifat-sifat religius, moderat, cerdas, dan mandiri. Inilah karakter demokratis khas Indonesia yang perlu dibangun dalam program pembangunan karakter bangsa.

Karakter demokratis khas Indonesia di atas, dicirikan oleh beberapa karakteristik berikut: Sifat religius dicirikan oleh sikap hidup dan kepribadian taat beribadah, jujur, terpercaya, dermawan, saling tolong menolong, dan toleran. Sifat moderat dicirikan oleh sikap hidup yang tidak radikal dan tercermin dalam kepribadian yang tengahan antara individu dan sosial, berorientasi materi dan ruhani, serta mampu hidup dan kerjasama dalam kemajemukan. Sifat cerdas dicirikan oleh sikap hidup dan kepribadian yang rasional, cinta ilmu, terbuka, dan berpikiran maju. Dan sikap mandiri dicirikan oleh sikap hidup dan kepribadian merdeka, disiplin tinggi, hemat, menghargai waktu, ulet, wirausaha, kerja keras, dan memiliki cinta kebangsaan yang tinggi tanpa kehilangan orientasi nilai-nilai kemanusiaan universal dan hubungan antarperadaban bangsa-bangsa.

3. Pendidikan Kewarganegaraan untuk Pembentukan Karakter Demokratis Warga Negara

Menghubungkan pendidikan kewarganegaraan dengan pembentukan karakter demokratis warga negara bukanlah sesuatu yang asing. Sejak kelahirannya, pendidikan kewarganegaraan memang didesain sebagai upaya mempersiapkan warga negara agar mampu berpartisipasi aktif secara politik dalam kehidupan kebangsaan dan kenegaraan. Bahkan terkait dengan karakter demokratis, Zamroni (ICCE, 2003) berpendapat bahwa pendidikan kewarganegaraan adalah pendidikan demokrasi yang bertujuan untuk mempersiapkan warga masyarakat berpikir kritis dan bertindak demokratis, melalui aktivitas menanamkan kesadaran kepada generasi baru bahwa demokrasi adalah bentuk kehidupan masyarakat yang paling menjamin hak-hak warga masyarakat. Selain itu, pendidikan kewarganegaraan adalah suatu proses yang dilakukan oleh lembaga pendidikan dimana seseorang mempelajari orientasi, sikap dan perilaku politik sehingga yang bersangkutan memiliki pengetahuan politik (*political knowledge*), kesadaran politik (*political awareness*), sikap politik (*political attitude*), efikasi politik (*political efficacy*) dan partisipasi politik (*political participation*) serta kemampuan mengambil keputusan politik secara rasional dan menguntungkan bagi dirinya, masyarakat, dan bangsa.

Pendidikan kewarganegaraan dikonstruksi sebagai muatan wajib pada

kurikulum pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi. Hal demikian dimaksudkan agar pendidikan kewarganegaraan mampu membentuk peserta didik menjadi manusia yang memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945 (Pasal 37 ayat [1] dan (2) UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional). Ketentuan ini sesungguhnya menunjukkan bahwa pendidikan kewarganegaraan menempati kedudukan yang strategis dalam upaya pembentukan watak dan peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, dan menjadikan manusia sebagai warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab.

Arti penting pendidikan kewarganegaraan dalam upaya menumbuhkan karakter demokratis warga negara sejalan dengan Laporan Komisi Internasional UNESCO tentang Pendidikan Abad 21 (*Report to UNESCO of The International Commission on Education for the Twenty-first Century*), yang diketuai Jacques Delors, bertajuk *Learning: The Treasure Within* (1996), yang mengungkapkan bahwa “...education for citizenship and democracy is par excellence an education that is not restricted to the space and time of formal education, it is also important for families and other members of the community to be directly involved.” (Delors, *et.al.*, 1996:62). Laporan itu

dimaknai Samsuri (2010) sebagai upaya mengukuhkan arti penting partisipasi demokratis warga negara melalui pendidikan kewarganegaraan dan praktik kewarganegaraan dengan menekankan perlunya sebuah hubungan sinergis antara pendidikan dan praktik demokrasi partisipatori.

Keterhubungan antara pendidikan dan demokrasi telah membuka dunia luas dengan minat baru terhadap pendidikan kewarganegaraan. Bahkan Patrick (Samsuri, 2010; 2012) menyebut bahwa para pemimpin di bekas negara-negara komunis sekalipun telah mewujudkan pembangunan demokrasi yang otentik yang tergantung kepada pembangunan melalui pendidikan yang berupaya menjadikan warga negara kompeten dan bersungguh-sungguh, yang tahu apa itu demokrasi, bagaimana melakukannya, dan mengapa demokrasi itu baik, atau paling sedikit lebih baik dari alternatif tipe-tipe sistem politik yang pernah ada. Dari sini, kita dapat sebutkan bahwa demokrasi sebagai sebuah nilai universal tidak akan mungkin menjadi satu kenyataan global, sebagai *common sense* masyarakat dunia, tanpa ada sebuah ikhtiar yang intensif dan serius secara internasional melalui apa yang disebut pendidikan.

Uraian tersebut sesungguhnya memperkuat pandangan bahwa pendidikan kewarganegaraan memiliki hubungan erat dengan upaya pembentukan karakter

demokratis warga negara. Persoalannya adalah bagaimana kebijakan pembentukan karakter demokratis warga negara itu dalam praktik pendidikan kewarganegaraan di Indonesia? Harus diakui bahwa kebijakan pendidikan untuk pembentukan karakter demokratis warga negara berhubungan dengan politik kebijakan pendidikan.

Dalam hubungannya dengan pendidikan, sistem politik akan mempersoalkan bagaimana kebijakan pendidikan mengakomodasi kepentingan pemeliharaan nilai-nilai politik melalui proses pendidikan dengan kemampuan warga negara mengartikulasikan kepentingannya ke dalam kebijakan itu sendiri (Samsuri, 2010). Selama periode Orde Baru, pendidikan sebagai instrumen pembentukan karakter warga negara menampakkan wujudnya dalam standarisasi karakter warga negara. Standarisasi itu mencerminkan kebajikan-kebajikan warga negara (*civic virtues*) yang disajikan dalam mata pelajaran Pendidikan Moral Pancasila (PMP) dan atau Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) dengan memasukan tafsir Pancasila menurut Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (P4) sebagai kontennya. *Civic virtues* itu masing-masing direduksi dari tafsir Pancasila menjadi 36 butir pengamalan nilai-nilai Pancasila. P4 inilah yang kemudian menjadi keharusan pedoman atau arah tingkah laku warga negara.

Keprihatinan terhadap kondisi pendidikan kewarganegaraan semasa Orde Baru telah melahirkan sejumlah inisiatif untuk melakukan pembaharuan. Seiring proses reformasi, muncul gagasan pendidikan kewarganegaraan paradigma baru sebagai pendidikan demokrasi (Winataputra, 2012:83). Paradigma ini memberi harapan untuk menyelaraskan (kembali) pendidikan kewarganegaraan dengan idealitas pendidikan kewarganegaraan demokratis yang telah berkembang dan masih terus dikembangkan di sejumlah negara demokratis. Idealitas itu, juga didukung oleh suasana reformasi yang memberi ruang kritis dan partisipasi otonom pada setiap warga negara.

4. Strategi Pendidikan Kewarganegaraan untuk Pembentukan Karakter Demokratis Warga Negara

Pendidikan kewarganegaraan memiliki fungsi penting dalam pembentukan karakter demokratis warga negara yang pada gilirannya secara kolektif membentuk karakter bangsa yang demokratis pula. Untuk dapat memerankan fungsinya tersebut, Patric (Samsuri, 2012) mengungkap bahwa pendidikan kewarganegaraan harus mampu mengembangkan komponen kompetensi karakter demokratis warga negara, yaitu pengetahuan kewargaan dan pemerintahan demokrasi, kecakapan kognitif dari kewargaan demokratis, kecakapan partisipasi

dari kewargaan demokratis, dan keutamaan karakter kewargaan demokratis.

Dalam pandangan lain, Winataputra (2012) mengajukan lima hal yang perlu dilakukan dalam rangka pembentukan karakter demokratis warga negara melalui pendidikan kewarganegaraan paradigma baru. *Pertama*, memberikan perhatian yang cermat dan usaha yang sungguh-sungguh pada pengembangan pengertian tentang hakikat dan karakteristik aneka ragam demokrasi. *Kedua*, mengembangkan kurikulum atau paket pendidikan yang sengaja dirancang untuk memfasilitasi siswa agar mampu mengeksplorasi bagaimana cita-cita demokrasi telah diterjemahkan ke dalam kelembagaan dan praktik di berbagai belahan bumi dan dalam berbagai kurun waktu.

Dalam konteks di atas, pendidikan kewarganegaraan seyogyanya memuat kajian tentang hakikat, karakteristik, dan nilai-nilai demokrasi baik pada tataran lokal, nasional, maupun internasional. Pada tataran nasional, misalnya dapat dikemukakan pilar-pilar demokrasi konstitusional Indonesia berdasarkan UUD 1945 yakni cita-cita, nilai, dan prinsip demokrasi Indonesia yang berlandaskan Ketuhanan Yang Maha Esa, memberikan jaminan hak asasi manusia, berdasarkan kedaulatan rakyat, bertujuan mencerdaskan bangsa, menerapkan prinsip pembagian kekuasaan, mengembangkan otonomi daerah, menegakkan “*rule of law*”, mengembangkan sistem peradilan yang

bebas dan tidak memihak, mengutamakan kesejahteraan rakyat, dan melaksanakan prinsip keadilan. Perlu menjadi catatan, bahwa isi kurikulum tersebut bukan sekedar agar siswa belajar tentang demokrasi, tapi harus memungkinkan siswa belajar berdemokrasi.

Ketiga, tersedianya sumber belajar yang memungkinkan siswa mampu mengeksplorasi sejarah demokrasi di negaranya untuk dapat menjawab persoalan apakah kekuatan dan kelemahan demokrasi yang diterapkan di negaranya secara jernih. *Keempat*, tersedianya sumber belajar yang dapat memfasilitasi siswa untuk memahami penerapan demokrasi di negara lain sehingga mereka memiliki wawasan yang luas tentang ragam ide dan sistem demokrasi dalam berbagai konteks. Ketersediaan sumber belajar yang memadai menjadi hal penting dalam pembentukan karakter demokratis warga negara. Dewasa ini, sumber-sumber belajar (tercetak, elektronik, maupun online) dapat mudah diperoleh, baik sumber yang sengaja dirancang guru untuk proses pembelajaran, maupun sumber yang tidak dirancang tetapi dapat memfasilitasi siswa belajar tentang demokrasi dan belajar berdemokrasi.

Kelima, dikembangkannya kelas sebagai laboratorium demokrasi (*democratic laboratory*), lingkungan sekolah sebagai “*micro cosmos of democracy*”, dan masyarakat luas sebagai “*open global*

classroom” yang memungkinkan siswa dapat belajar tentang demokrasi dalam situasi yang demokratis, dan untuk tujuan melatih diri sebagai warga negara yang demokratis.

Menjadikan kelas sebagai laboratorium demokrasi artinya menjadikan kelas pendidikan kewarganegaraan yang memberdayakan siswa yang diwujudkan dalam perilaku interaktif guru dan siswa, siswa dan siswa, serta penciptaan iklim kelas pendidikan kewarganegaraan yang mendukung pengambilan keputusan secara demokratis. Untuk itu, pendekatan pembelajaran pendidikan kewarganegaraan harus berorientasi pada proses berpikir kritis (*critical thinking*) dan pemecahan masalah (*problem solving*).

Demikian juga dengan lingkungan sekolah dan masyarakat, keduanya harus dijadikan sebagai bagian dari kelas pendidikan kewarganegaraan yang lebih luas. Harapannya, kesenjangan yang antara yang dipelajari di sekolah dengan yang sungguh-sungguh terjadi dalam kehidupan lingkungan masyarakat secara sistematis dapat dikurangi atau bahkan dihindari. Hal ini penting, sebab pembangunan karakter demokratis merupakan tugas dari semua pihak.

Di sisi lain, hal terpenting yang perlu kita bangun adalah kompetensi guru pendidikan kewarganegaraan yang mampu menafsirkan dan menerjemahkan paradigma

baru tersebut agar proses pembelajaran sejalan dengan tuntutan pembentukan karakter warga negara demokratis dan memiliki kompetensi kewarganegaraan (Samsuri, 2010). Guru pendidikan kewarganegaraan yang kompeten dan professional harus disiapkan secara serius oleh lembaga pendidikan tenaga kependidikan. Lebih dari itu, guru pendidikan kewarganegaraan harus menjadi teladan hidup berdemokrasi yang memancarkan nilai-nilai dan karakter demokratis yang religius, moderat, cerdas, dan mandiri dalam proses pembelajaran di kelas, maupun dalam kehidupan di luar kelas.

5. Penutup

Tumbuhnya karakter demokratis pada setiap warga negara diperlukan untuk mendukung tercapainya tujuan pendidikan nasional dalam rangka pembangunan bangsa dan karakter. Karakter demokratis warga negara yang menjadi modal sosial pembangunan karakter dan bangsa harus berlandaskan pada nilai-nilai filosofis bangsa, yaitu Pancasila dan UUD 1945. Karena itu, karakter demokratis warga negara Indonesia tidak dapat digeneralisir dengan karakter dan praktik kehidupan demokrasi di negara lain. Karakter demokratis yang seyogyanya menjadi kekhasan Indonesia ditandai oleh sifatnya yang religius, moderat, cerdas, dan mandiri. Sekalipun diakui bahwa pembentukan

karakter warga negara kita (sangat) dipengaruhi oleh kebijakan politik pendidikan dan pembangunan karakter sebuah rezim, tetapi peran pendidikan kewarganegaraan untuk pembentukan karakter demokratis sesungguhnya tidak pernah berubah.

Daftar Pustaka

- Budimansyah, D. (2010). *Penguatan Pendidikan Kewarganegaraan untuk Membangun Karakter Bangsa*, Bandung: Widya Aksara Press.
- Delors, J, et.al. (1996). *Learning: the Treasure Within, Report to UNESCO of The International Commission on Education for the Twenty-first Century*, Paris: UNESCO
- Hidayatullah, M.F. (2011). "Pendidikan Karakter dan Pengembangan Metode Pembelajaran Nilai". Bahan tayangan disampaikan dalam Pentaloka Doswar se-Jawa Tengah dan DIY di Dodik Bela Negara Resimen Kodam IV/Diponegoro Magelang, 12 April 2011.
- ICCE UIN. (2005). *Demokrasi, Hak Asasi Manusia, dan Masyarakat Madani*. Jakarta: Kerjasama ICCE UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dengan Prenada Media.
- Kalidjernih, F.K. (2010). "Situasionisme: Refleksi untuk Pendidikan Karakter di Indonesia", disampaikan dalam Seminar Aktualisasi Pendidikan Karakter yang diselenggarakan oleh Program Studi PKn SPs UPI, 15 November 2010.
- Kementerian Pendidikan Nasional. (2010). *Rencana Induk Pengembangan Pendidikan Karakter Bangsa*. Jakarta: Kementerian Pendidikan Nasional.
- Pimpinan Pusat Muhammadiyah. (2009). *Revitalisasi Visi dan Karakter Bangsa: Agenda Indonesia ke Depan*. Yogyakarta: Pimpinan Pusat Muhammadiyah.
- Purwasasmita, M. (2010). "Memaknai Konsep Alam Cerdas dan kearifan Nilai Budaya Lokal dalam Pendidikan Karakter Bangsa", dalam *Prosiding Seminar Aktualisasi Pendidikan Karakter*, Bandung: Widya Aksara Press.
- Pusat Kurikulum Kementerian Pendidikan Nasional. (2010). *Pengembangan Pendidikan Budaya dan Karakter Bangsa: Bahan Pelatihan Penguatan Metodologi Pembelajaran Berdasarkan Nilai-nilai Budaya untuk Membentuk Daya Saing dan Karakter Bangsa*. Jakarta: Kementerian Pendidikan Nasional.
- Samsuri. (2010). "Pembentukan Karakter Warga Negara Demokratis dalam Politik Pendidikan Indonesia Periode Orde Baru Hingga Era Reformasi". Makalah disampaikan dalam Diskusi MGMP PKn Kabupaten Sleman, 18 Oktober 2010.
- Samsuri. (2012). *Pendidikan Karakter Warga Negara: Kritik Pembangunan Karakter Bangsa*. Surakarta: Pustaka Hanif.
- Suyanto. (2011). "Urgensi Pendidikan Karakter". Tersedia: [Online] <http://www.mandikdasmen.depdiknas.go.id/web/pages/urgensi.html>. (24 Maret 2011)
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- Winataputra, U.S. (2012). *Pendidikan Kewarganegaraan dalam Perspektif Pendidikan untuk Mencerdaskan Kehidupan Bangsa: Gagasan, Instrumentasi, dan Praksis*. Bandung: Widya Aksara Press.

Prodi Bimbingan dan Konseling
Kampus 2
Jl. Pramuka 42, Sidikan, Umbulharjo, Yogyakarta 55161

Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar
Kampus 5
Jl. Ki Ageng Pemanahan 19, Yogyakarta
Telp. : (0274) 563515, 511830, 379418, 371120
Fax. : (0274) 564604

ISBN: 978-6027-0296-5-1

